

**ANALISIS *TAX BUOYANCY* PADA
ASEAN-5 (INDONESIA, FILIPINA, MALAYSIA,
SINGAPURA, DAN THAILAND)
TAHUN 2002-2016**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**DEWI SETYONINGRUM
NIM. 12020114120045**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dewi Setyoningrum
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114120045
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS *TAX BUOYANCY* PADA ASEAN-5
(INDONESIA, FILIPINA, MALAYSIA, SINGAPURA,
THAILAND) TAHUN 2002-2016**
Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Semarang, 02 Januari 2019

Dosen Pembimbing,



(Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.)

NIP. 197107251997022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dewi Setyoningrum
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114120045
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS TAX BUOYANCY PADA ASEAN-5
(INDONESIA, FILIPINA, MALAYSIA, SINGAPURA,
THAILAND) TAHUN 2002-2016**
Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Desember

Tim Penguji

1. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.
2. Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar, S.E, M.A
3. Dr. Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si.



Handwritten signatures of the examiners, with dotted lines indicating the names of the individuals listed in the adjacent list.

Mengetahui,
Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan



Amis Chatri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dewi Setyoningrum menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis *Tax Buoyancy* Pada ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand) Tahun 2002-2016 adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 02 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



(Dewi Setyoningrum)
NIM. 12020114120045

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan megubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka.” (QS.Ar-Rad: : ayat 11)

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak, Ibu, Adik, dan teman-teman saya . Terima kasih untuk kerja sama, doa, dan motivasi yang selalu mengiringi saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRACT

The fiscal deficit in developing countries is a major problem that has prompted government efforts to increase tax revenues. There is a positive relationship between tax and PDB. With tax buoyancy, the total response of tax revenue to changes in PDB can be measured without requiring control of policy changes in the tax or administrative system. This study aims to identify analysis of tax buoyancy in ASEAN-5 countries (Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand) in 2002-2016.

The analysis method in this study uses panel data regression analysis. Panel data regression analysis with the Common Effect Model method is used to analyze the influence of the share of manufacturing sector, share of agricultural sector, share of import sector, share of service sector, budget deficit, corruption, and tax reform to tax buoyancy in ASEAN-5 countries (Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand) in 2002-2016. The data used in this research is secondary data.

The panel data regression results show that share of manufacturing sector, share of import sector, share of service sector, budget deficit, corruption, and tax reform have a significant effect to tax buoyancy. The share of manufacturing sector with a coefficient of 1.30 as dominant factor affecting tax buoyancy. While for the share of agricultural sector has a coefficient -0.60 and insignificant effect on tax buoyancy in ASEAN-5 countries (Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand) in 2002-2016.

Keywords: *budget deficit , tax buoyancy, tax revenue, gross domestic product*

ABSTRAK

Defisit fiskal pada negara berkembang merupakan masalah utama sehingga mendorong upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Terdapat hubungan positif antara pajak dengan PDB. Dengan *tax buoyancy*, respon total penerimaan pajak terhadap perubahan PDB dapat diukur tanpa memerlukan kontrol perubahan kebijakan dalam sistem pajak atau administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi analisis *tax buoyancy* di negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) tahun 2002-2016.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.. Analisis regresi data panel dengan metode *Common Effect Model* digunakan untuk menganalisis pengaruh *share* sektor manufaktur, *share* sektor pertanian, *share* sektor impor, *share* sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi perpajakan terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand tahun 2002-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa *share* sektor manufaktur, *share* sektor impor, *share* sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi perpajakan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap *tax buoyancy*. *Share* sektor manufaktur dengan koefisien 1,30 sebagai faktor dominan yang mempengaruhi *tax buoyancy*. Sedangkan untuk *share* sektor pertanian memiliki koefisien -0,60 yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand tahun 2002-2016.

Kata kunci : defisit anggaran, *tax buoyancy*, *tax revenue*, produk domestik bruto

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Tax Bouyancy* Pada ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) Tahun 2002-2016.” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan, dukungan, dan motivasi sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr.Suharnomo, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan waktunya untuk memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Edy Yusuf Agung Gunanto, MSc. Ph.D. selaku dosen wali dari penulis yang selalu memberikan doa, bimbingan, dan perhatian selama ini.
4. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si, Ph.D. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.

5. Seluruh dosen dan staff Departemen Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Sukiman dan Ibu Muryani yang telah mendidik, membimbing, memberikan doa, dan pengorbanan yang tak ternilai selama ini. Serta adik penulis Febiyani Firmani D.A. yang selalu memberikan doa, mendengarkan keluh kesah, dan motivasi serta semangat.
7. Haevy Nur Ayati dan Tarina Palokoto sebagai teman seperbimbingan dengan penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dan waktunya untuk menyelesaikan skripsi serta ujian komprehensif.
8. Dewi Azzizah R dan Henty Eka P sebagai sahabat penulis yang selalu bersedia untuk direpotkan, pendengar yang baik untuk keluh kesah dari penulis, memberikan doa, semangat, nasihat, serta tenaganya dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis lainnya di grup "*Timoholicious*" dari kosan Wisma Dhany yang selalu ada dalam keadaan suka dan duka, dan selalu memberikan motivasi serta doa bagi penulis didalam penyelesaian skripsi.
10. Keluarga magang LPM Edents Akhmad Sadewa S, Adhevyo Reza, dan Samuel Petra yang sudah bersedia mengajari, motivasi, arahan, serta semangatnya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan ujian komprehensif.

11. Seluruh teman seperjuangan IESP 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tempat berbagi ilmu dan canda tawa selama kurang lebih 4 tahun terakhir.
12. Seluruh anggota magang LPM Edents 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak pengalaman dan motivasi.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis dalam menyusun skripsi ini mungkin masih memiliki kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Semarang, 02 Januari 2019
Penulis,



(Dewi Setyoningrum)
NIM. 12020114120045

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	26
1.3 Tujuan Penelitian.....	29
1.4 Kegunaan Penelitian	30
1.5 Sistematika Penelitian.....	30
BAB II TELAAH PUSTAKA	33
2.1 Landasan Teori	33
2.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB)	33
2.1.2 Pengertian Pajak	40
2.1.3 Defisit Anggaran	57
2.1.4 Korupsi	68
2.1.5 Konsep Kinerja Pajak.....	71
2.1.6 Reformasi Perpajakan.....	75
2.1.7 Tarif Pajak	76

2.2 Hubungan antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.....	76
2.2.1 Hubungan Antara Sektor Manufaktur dengan <i>Tax Buoyancy</i>	76
2.2.2 Hubungan Antara Sektor Pertanian dengan <i>Tax Buoyancy</i>	77
2.2.3 Hubungan Antara Sektor Impor dengan <i>Tax Buoyancy</i>	78
2.2.4 Hubungan Antara Sektor Jasa dengan <i>Tax Buoyancy</i>	79
2.2.5 Hubungan Antara Defisit Anggaran dengan <i>Tax Buoyancy</i>	79
2.2.6 Hubungan Antara Korupsi dengan <i>Tax Buoyancy</i>	80
2.2.7 Hubungan Antara Reformasi Perpajakan dengan <i>Tax Buoyancy</i>	81
2.3 Penelitian Terdahulu	81
2.4 Kerangka Pemikiran	84
2.5 Hipotesis	87
BAB III METODE PENELITIAN.....	88
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	88
3.1.1 Variabel Penelitian	88
3.1.2 Definisi Operasional Variabel	88
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	92
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	93
3.4 Metode Analisis	93
3.5.1 Metode Analisis Data Panel	93
3.5.2 Pemilihan Model Estimasi dalam Data Panel.....	97
3.6 Model Penelitian.....	99
3.7 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	100
3.7.1 Deteksi Normalitas	101
3.7.2 Deteksi Heteroskedastisitas	102
3.7.3 Deteksi Autokorelasi	102
3.7.4 Deteksi Multikolinearitas	103
3.8 Uji Statistik	105
3.8.1 Uji Signifkasi Simultan (Uji F)	105
3.8.2 Uji Koefisien Regresi Individual (Uji t-statsistik).....	106
3.8.3 Uji R <i>square</i> (R^2).....	108

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	109
4.1 Gambaran Umum Wiayah	109
4.2.1 Kondisi Geografis dan Administratif	109
4.2.2 Kondisi Perekonomian	111
4.2.1 Kondisi Penduduk Asia Tenggara	114
4.2 Analisis Data.....	115
4.2.1 <i>Tax Buoyancy</i> Negara ASEAN-5	115
4.2.2 Kondisi <i>Share</i> Sektor Manufaktur Negara ASEAN-5.....	117
4.2.3 Kondisi <i>Share</i> Sektor Pertanian Negara ASEAN-5	118
4.2.4 Kondisi <i>Share</i> Sektor Impor Negara ASEAN-5.....	119
4.2.5 Kondisi <i>Share</i> Sektor Jasa Negara ASEAN-5.....	120
4.2.6 Trend Defisit Anggaran Negara ASEAN-5.....	121
4.2.7 Trend <i>Control of Corruption</i> Negara ASEAN-5.....	122
4.2.8 Perkembangan Tarif PPh Badan Negara ASEAN-5.....	124
4.3 Analisis <i>Tax Buoyancy</i>	125
4.3.1 Pemilihan Model Terbaik	125
4.4 Interpretasi Hasil.....	126
4.4.1 Hasil Uji Deteksi Asumsi Klasik.....	126
4.4.2 Uji Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i>	130
4.5 Hasil Uji Statistik	132
4.4.1 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F)	132
4.4.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji-t).....	133
4.4.3 Koefisien Determinasi (Uji-R ²).....	138
4.6 Analisis Ekonomi.....	138
4.5.1 Analisis Pengaruh <i>Share</i> Sektor Manufaktur Terhadap <i>Tax Buoyancy</i> di Negara ASEAN-5 pada tahun 2002-2016	138
4.5.2 Analisis Pengaruh <i>Share</i> Impor Terhadap <i>Tax Buoyancy</i> di Negara ASEAN-5 pada tahun 2002-2016.....	140
4.5.3 Analisis Pengaruh <i>Share</i> Jasa Terhadap <i>Tax Buoyancy</i> di Negara ASEAN- 5 pada tahun 2002-2016	141

4.5.4 Analisis Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap <i>Tax Buoyancy</i> di Negara ASEAN-5 pada tahun 2002-2016.....	143
4.5.5 Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap <i>Tax Buoyancy</i> di Negara ASEAN-5 pada tahun 2002-2016	144
4.5.6 Analisis Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap <i>Tax Buoyancy</i> di Negara ASEAN-5 pada tahun 2002-2016	146
BAB V PENUTUP	148
5.1 Kesimpulan	148
5.2 Keterbatasan	150
5.3 Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	161

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Peringkat Daya Saing Negara ASEAN berdasarkan <i>Global Competitiveness Index</i> (GCI) Tahun 2014-2018	3
Tabel 1.2 Perkembangan PDB (<i>Gross Domestic Product</i>) Negara ASEAN-5 Tahun 2012-2016 (dollar).....	14
Tabel 1.3 Perkembangan <i>Tax Revenue</i> Negara ASEAN-5 Tahun 2012-2016 (dollar)..	15
Tabel 1.4 Tarif PPh Badan Negara ASEAN-5 Tahun 2003-2012 (persen)	16
Tabel 1.5 Kontribusi Sektor Manufaktur Terhadap PDB ASEAN-5 Tahun 2012-2016 (persen).....	17
Tabel 1.6 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDB ASEAN-5 Tahun 2012-2016 (persen).....	18
Tabel 1.7 Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDB ASEAN-5 Tahun 2012-2016 (persen).....	19
Tabel 1.8 Kontribusi Sektor Impor Terhadap PDB ASEAN-5 Tahun 2012-2016 (persen).....	19
Tabel 1.9 Perkembangan <i>Tax buoyancy</i> Negara ASEAN-5 Tahun 2012-2016 (persen)	22
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Negara ASEAN Tahun 2012-2016 (juta jiwa).....	115
Tabel 4.2 Perkembangan Tarif PPh Badan Negara ASEAN-5 (persen)	124
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>F-restricted</i>	126
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	128
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedasitas	129
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	130
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Regresi Data Panel (<i>Common Effect Model</i>)	131
Tabel 4.8 Hasil Uji-F.....	133
Tabel 4.9 Hasil Uji-R ²	138

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Setelah Krisis Ekonomi 1998.....	6
Gambar 1.2 Perkembangan PDB Negara ASEAN-5 Tahun 2001-2017 (US\$).....	7
Gambar 1.3 <i>Budgetary Central Government</i> Negara ASEAN-5 Tahun 2001-2016 (<i>percent of PDB</i>).....	11
Gambar 1.4 Perkembangan <i>Tax Ratio</i> Negara ASEAN-5 Tahun 2012-2016 (persen)	20
Gambar 1.5 <i>Control of Corruption</i> Negara ASEAN-5 Tahun 2012-2016 (persen)	24
Gambar 2.1 Kurva Laffer.....	56
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran.....	86
Gambar 4.1 Peta Asia Tenggara.....	110
Gambar 4.2 PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Negara ASEAN-5 Tahun 2002-2016 (US\$)	112
Gambar 4.3 Pertumbuhan PDB Per Kapita Negara ASEAN-5 Tahun 2002-2016 (persen)	113
Gambar 4.4 Rata-rata Pertumbuhan PDB Per Kapita Negara ASEAN-5 Tahun 2002- 2016 (persen).....	114
Gambar 4.5 <i>Tax Buoyancy</i> Negara ASEAN-5 (persen).....	116
Gambar 4.6 <i>Share</i> Sektor Manufaktur Negara ASEAN-5 (<i>percent of PDB</i>)	118
Gambar 4.7 <i>Share</i> Sektor Pertanian Negara ASEAN-5 (<i>percent of PDB</i>)	119
Gambar 4.8 <i>Share</i> Sektor Impor Negara ASEAN-5 (<i>percent of PDB</i>).....	120
Gambar 4.9 <i>Share</i> Sektor Jasa Negara ASEAN-5 (<i>percent of PDB</i>).....	121
Gambar 4.10 Trend Defisit Anggaran Negara ASEAN-5 (<i>percent of PDB</i>).....	122
Gambar 4.11 Trend <i>Control of Corruption</i> Negara ASEAN-5 (persen)	123
Gambar 4.12 Hasil Uji Normalitas.....	127

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Variabel Penelitian	162
Lampiran B Hasil Uji <i>F-restricted</i>	167
Lampiran C Hasil Uji Normalitas	168
Lampiran D Hasil Uji Multikolinearitas	168
Lampiran F Hasil Uji Autokorelasi.....	168
Lampiran E Hasil Uji Heteroskedasitas	169
Lampiran G Hasil Estimasi Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i>	170

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya era globalisasi ekonomi antar negara di dunia saat ini mengakibatkan mulai terciptanya persaingan di bidang ekonomi yang semakin erat. Integrasi yang dilakukan oleh berbagai negara ini sampai menghilangkan batas negara, sehingga keterkaitan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional menjadi semakin kuat. Beberapa bentuk integrasi yang dilakukan antara lain dalam hal sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, serta teknologi.

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan organisasi geo-politik dan ekonomi antar negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 ini di tanda tangani oleh lima wakil pemerintahan Asia Tenggara. Pembentukan perhimpunan ini pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan politik untuk mengukuhkan kemerdekaan masing-masing negara dari kepentingan *super power*, sekaligus melegitimasi kedaulatan negara-negara anggota ASEAN dalam memuwujudkan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dimana kondisi stabilitas tersebut dapat terwujud melalui kerjasama ekonomi dan sosial budaya serta memajukan perdamaian di tingkat regional.

Setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-V di Bangkok pada tahun 1955, para kepala negara Pemerintahan ASEAN bekerja sama untuk mengantarkan ASEAN yang mencakup semua negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga pada KTT tersebut Perdana Menteri Thailand menyatakan untuk mempersatukan kesepuluh negara yang berada di Asia Tenggara, dan diharapkan dapat menjadi suatu kekuatan yang ampuh dalam mewujudkan visi dari terbentuknya ASEAN.

Prasetyo (2016) menyatakan bahwa kawasan ASEAN merupakan blok baru ekonomi dunia dengan anggota negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara terdiri dari sepuluh negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam. Kebijakan integrasi ekonomi antar negara-negara ASEAN yang akan dijalankan dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*) di akhir Desember 2015 menjadikan ASEAN sebagai pesaing blok-blok ekonomi yang telah terbentuk sebelumnya. Dibentuknya MEA bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, dan mampu mengatasi permasalahan di bidang ekonomi antar negara ASEAN.

Kekuatan ekonomi di kawasan ASEAN berada pada lima negara yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Negara-negara tersebut dikatakan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan dikenal juga dengan

ASEAN-5. Selain itu negara yang tergabung dalam ASEAN-5 juga merupakan pendiri awal dari dibentuknya organisasi ASEAN.

Menurut laporan dari *World Economic Forum* (WEF) lima negara yang disebut dengan ASEAN-5 tersebut secara konstan menempati peringkat 60 teratas daya saing negara-negara dunia berdasarkan *Global Competitiveness Index* (GCI) menurut 12 pilar, salah satunya adalah kondisi stabilitas makroekonomi suatu negara, yang di dalamnya meliputi kategori *debt coverage ratio, government budget balance, gross national savings, inflation, foreign debt, and hysteresis indicator*. dari tahun 2014 sampai 2018 yang terdiri dari peforma daya saing 144 negara di dunia.

Tabel 1.1
Peringkat Daya Saing Negara ASEAN
berdasarkan *Global Competitiveness Index* (GCI)
Tahun 2014-2018

Negara	2014-2015		2015-2016		2016-2017		2017-2018	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
Indonesia	34	4,57	37	4,52	41	4,52	36	4,68
Filipina	52	4,40	47	4,39	57	4,36	56	4,35
Malaysia	20	5,16	18	5,23	25	5,16	23	5,17
Singapura	2	5,65	2	5,68	2	5,72	3	5,71
Thailand	31	4,66	32	4,64	34	4,64	32	4,72
Vietnam	68	4,23	56	4,30	60	4,31	55	4,36
Lao PDR	93	3,91	83	4,00	93	3,93	98	3,91
Myanmar	134	3,24	131	3,32	<i>Not Available</i>	<i>Not Available</i>	<i>Not Available</i>	<i>Not Available</i>
Kamboja	95	3,89	90	3,94	89	3,98	94	3,93
Brunei	<i>Not Available</i>	<i>Not Available</i>	<i>Not Available</i>	<i>Not Available</i>	58	4,35	46	4,52
Darussalam	<i>Available</i>	<i>Available</i>	<i>Available</i>	<i>Available</i>				

Sumber: *World Economic Forum*, 2014-2018.

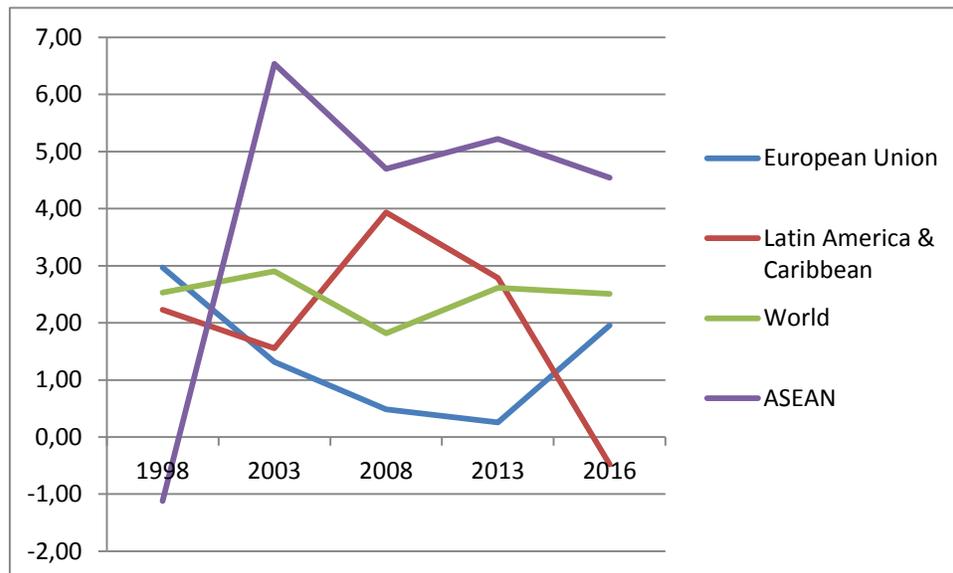
Sebagai satu kesatuan wilayah, ASEAN memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia (2008), jumlah penduduk mencapai 567,6 juta orang dan dengan total PDB yang mencapai sekitar US\$ 1,1 triliun. Dengan kondisi yang seperti ini maka ASEAN menjanjikan potensi pasar yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina) berdasarkan *World Development Indicator* secara umum angka pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada ASEAN-5 cenderung berfluktuatif dari tahun 1990 sampai 2009. Pada tahun 1998 seluruh negara ASEAN-5 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dikarenakan terjadinya krisis yang melanda negara Asia, berawal dari turunya nilai mata uang Bath Thailand, lalu Peso Filipina, Ringgit Malaysia, Rupiah Indonesia, bahkan Dollar Singapura. Sehingga hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5. Indonesia merupakan negara dengan angka penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu 13,13 persen, Thailand sebesar 10,51 persen, Malaysia sebesar 7,36 persen, dan Singapura hanya 1,38 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik selama periode tertentu, hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam perekonomian makro suatu negara. Menurut Sukirno (2011: 423), dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah

produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa, dan penambahan produksi barang modal.

Setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 negara-negara yang berada di Asia Tenggara masih bisa bertahan dengan melakukan perbaikan pada kondisi perekonomiannya. Hal ini terlihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi pada negara ASEAN setelah krisis ekonomi meningkat jauh lebih besar dibandingkan negara Uni Eropa dan Amerika Latin yang cenderung mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonomi, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang meningkat tapi masih berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Ketika krisis ekonomi terjadi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN hanya berada di angka -1,12 persen namun selang lima tahun kemudian, kondisi perekonomian pada negara ASEAN pun kembali menunjukkan peningkatan dan melaju pesat berada di angka 6,53 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi pada negara Uni Eropa yang hanya berada pada angka 1,31 persen, Amerika Latin dan Carribean sebesar 1,55 persen, dan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 2,90 persen. Besarnya perbandingan ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Setelah Krisis Ekonomi 1998
(dalam persen)



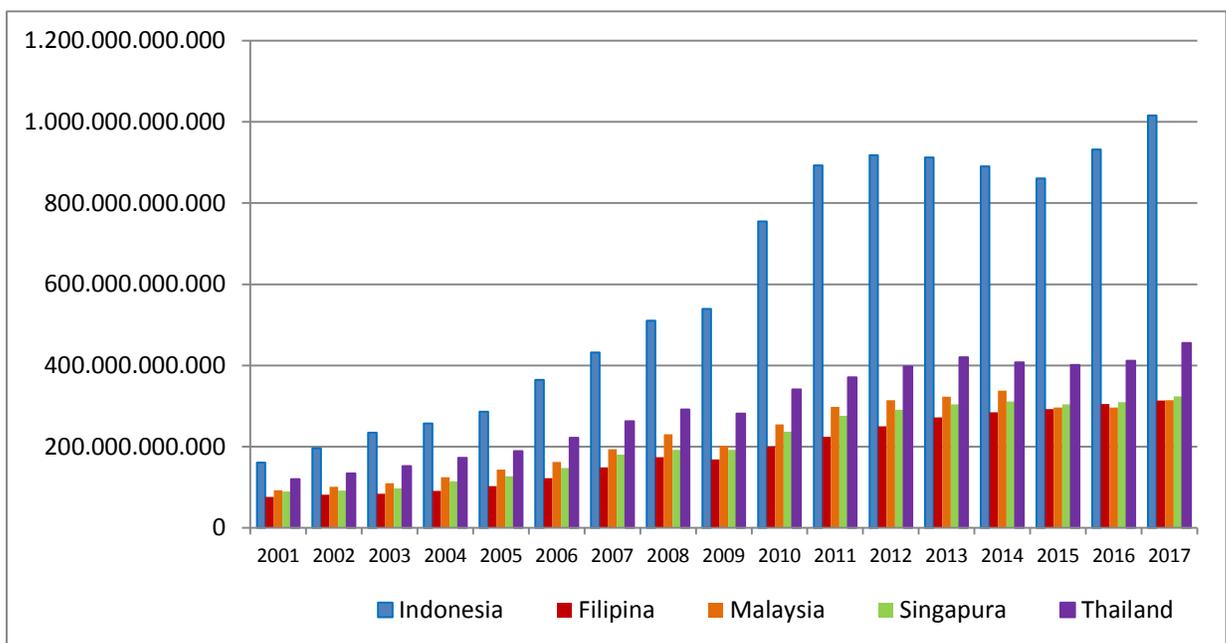
Sumber: *World Bank*, 2018 (data diolah)

Hingga di tahun 2016, kondisi pertumbuhan perekonomian negara ASEAN masih berada di atas pertumbuhan perekonomian dunia, meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 4,54 persen di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya melalui perbaikan pada kebijakan mikro dan makro ekonomi sehingga mampu mendorong perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dilihat dari besarnya PDB suatu negara. Nilai PDB yang tinggi mengasumsikan bahwa kondisi perekonomian dalam suatu negara yang bersangkutan itu baik. Oleh sebab itu, setiap negara selalu menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam

perencanaan dan tujuan pembangunan negaranya agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Gambar 1.2
Perkembangan PDB Negara ASEAN-5
Tahun 2001-2017
(US\$)



Sumber: *World Bank*, 2018.

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan PDB negara ASEAN-5 dari tahun 2001 sampai 2017. Dibandingkan lima negara utama di ASEAN, Indonesia memiliki angka perkembangan PDB paling tinggi. Urutan kedua ditempati oleh Thailand, kemudian Singapura, Malaysia dan diurutan terakhir ditempati oleh Filipina.

Pada tahun 2017, kontribusi Indonesia merupakan kontributor terbesar terhadap PDB ASEAN sebesar 41,91 persen. Kemudian ada Thailand diurutan kedua dengan kontribusi sebesar 18,78 persen, Singapura sebesar 13,36 persen, Malaysia sebesar 12,98 persen, dan di posisi terakhir Filipina dengan kontribusi sebesar 12,94 persen.

Teori John Maynard Keynes dan tokoh ekonomi lainnya telah menjelaskan mengenai kekuatan apa saja yang menyebabkan fluktuasi ekonomi, serta membantu dalam merumuskan suatu pendekatan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari *business cycle*. Menurut Boediono (2008: 32), Keynes mengatakan bahwa untuk menolong sistem perekonomian suatu negara, maka orang harus bersedia untuk meninggalkan ideology *laissez faire* yang terkandung dalam pemikiran klasik. Sehingga pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan yang aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Bentuk campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan perekonomian adalah melalui pengeluaran pemerintah dalam membiayai segala bentuk kegiatan perekonomian secara umum.

Alat intervensi pemerintah yang paling efektif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sodik (2007) menyimpulkan bahwa pengaruh variabel pengeluaran pemerintah baik itu pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin ternyata berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu

daerah dalam tumbuh dan berkembangnya daerah sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Pengeluaran pemerintah ini diatur dalam satu kerangka anggaran pemerintah. Anggaran suatu negara dapat disusun berbeda-beda tergantung pada kondisi perekonomian negara yang bersangkutan. Suatu negara dapat menyusun anggarannya secara seimbang apabila kondisi perekonomiannya normal. Kebijakan anggaran yang *surplus* ini dapat diaplikasikan apabila terjadi perubahan kebijakan fiskal yang Kontraksioner.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah dalam mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Kebijakan fiskal sendiri bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek, dan mempengaruhi sisi penawaran dalam jangka panjang melalui peningkatan kapasitas perekonomian (Surjaningsih *et.al.* 2012).

Selain itu, kebijakan fiskal juga diartikan sebagai kebijakan makro yang dijalankan oleh pemerintah bersamaan dengan kebijakan moneter dan sektoral. Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah dapat terlihat melalui kebijakan anggaran. Dimana sebuah kebijakan anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

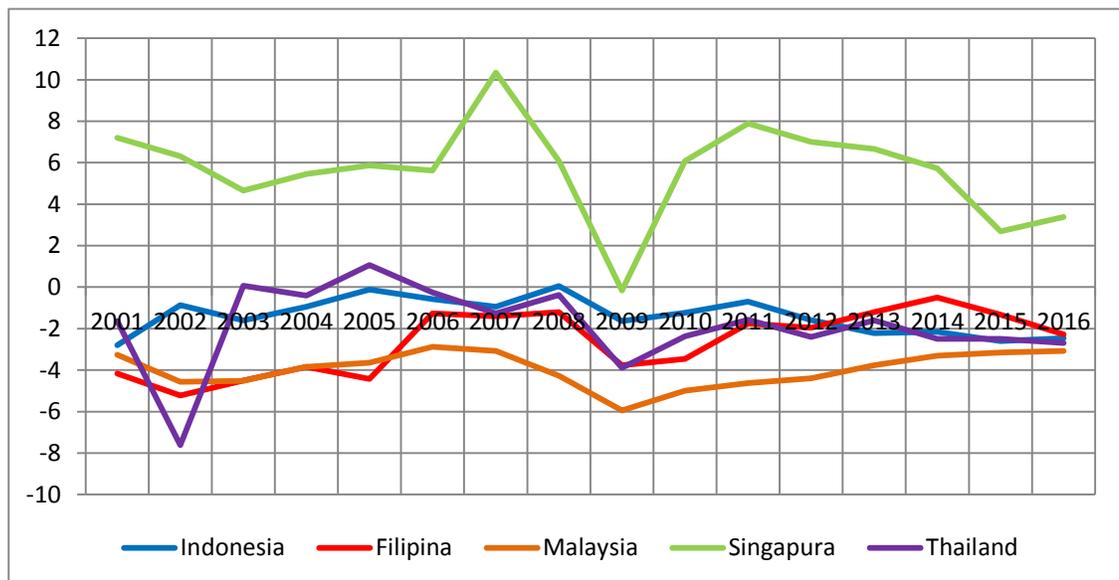
Dalam proses penyusunan anggaran, pemerintah dihadapkan pada tiga kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, surplus anggaran, dan defisit anggaran. Dari ketiga anggaran tersebut, kondisi perekonomian yang paling dicita-citakan oleh setiap negara adalah saat anggaran negaranya berimbang antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai kondisi yang ideal bagi indikator kesehatan makroekonomi negara.

Berbeda dengan pendapat Mankiw (2000), kebijakan fiskal yang optimal bagi suatu negara sebagian besar membutuhkan kondisi defisit atau surplus pada anggarannya, karena setidaknya ada tiga alasan, yaitu alat stabilisasi, *tax smoothing*, dan redistribusi intergenerasi. Pada umumnya, negara berkembang dan maju mengadopsi kebijakan defisit anggaran ketika tujuan makro ekonomi bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga pemerintah akan lebih banyak melakukan pengeluaran pemerintah (kebijakan fiskal ekspansif). Kebijakan defisit anggaran merupakan kondisi total pengeluaran pemerintah (belanja negara) lebih besar dari total penerimaan pemerintah (pendapatan negara). Tetapi sebaliknya, jika kebijakan anggaran bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah akan mengurangi sisi pengeluarannya (kebijakan fiskal kontraktif).

Pada negara ASEAN-5 yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand mayoritas kondisi negaranya masih berkembang, kecuali Singapura. Sehingga kebijakan dalam penyusunan anggaran yang

digunakan adalah defisit anggaran. Anggaran defisit dengan kondisi dimana belanja lebih besar dari pendapatan ini bersifat stimulus bagi perekonomian negara dan sangat diperlukan untuk negara-negara yang perekonomiannya sedang mengalami resesi.

Gambar 1.3
Budgetary Central Government Negara ASEAN-5
Tahun 2001-2016
(percent of PDB)



Sumber : *International Monetary Fund (IMF)*, 2018.

Gambar 1.3 menunjukkan kondisi *share* dari anggaran pemerintah untuk negara ASEAN-5 selama periode tahun 2001-2016. Singapura merupakan negara dengan kondisi ekonomi yang sudah maju sehingga pemerintahannya menerapkan sistem surplus anggaran. Hal ini terlihat bahwa dari tahun 2001 sampai 2016 Singapura selalu berada pada kondisi surplus anggaran meskipun

masih berfluktuatif untuk tiap tahunnya, dan hanya di tahun 2009 Singapura mengalami defisit anggaran yang disebabkan adanya peningkatan pada stimulus fiskal untuk meningkatkan investasi di negaranya. Hingga akhirnya Singapura dapat memperbaiki kebijakan fiskal dan negara ini kembali mengalami surplus anggaran di tahun 2010.

Di tahun 2001 defisit anggaran tertinggi berada pada negara Filipina sebesar -4,17 persen, dan di urutan kedua ada pada negara Malaysia dengan besarnya defisit anggaran -3,26 persen, kemudian ada Indonesia sebesar -2,8 persen, dan terakhir Thailand sebesar -1,63 persen. Kondisi defisit atau surplus anggaran pada negara ASEAN-5 ini cenderung berfluktuatif, hingga di tahun 2016 defisit atau surplus anggaran pada negara ASEAN-5 kecuali Thailand mengalami penurunan secara berurutan Indonesia sebesar -0,34 persen, Filipina -1,89 persen, Malaysia -0,19 persen, Singapura 3,38 persen, sedangkan untuk negara Thailand mengalami peningkatan defisit anggaran sebesar 1,07 persen.

Defisit anggaran merupakan salah satu pokok permasalahan bagi negara-negara berkembang selama beberapa dekade terakhir. Alasan di balik besarnya dalam ketidakseimbangan fiskal adalah adanya ekspansi pengeluaran yang cepat namun pengumpulan pendapatan yang rendah. Model pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer (1986) telah menunjukkan bahwa pertumbuhan dapat dicapai dengan mengurangi ketidakseimbangan fiskal, yang dapat dicapai baik dengan menurunkan pengeluaran atau meningkatkan penerimaan pajak.

Namun, banyak negara berkembang telah menggunakan opsi untuk mengurangi pengeluaran baik itu dalam hal kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, selain juga peningkatan dalam sisi penerimaan pajak (Ahmed, 2010).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dilakukan melalui berbagai reformasi tata kelola pajak dan optimalisasi penerimaan pajak dengan meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak pada masyarakat. Sehingga keberhasilan dalam pemungutan pajak nantinya dapat terlihat melalui besarnya *tax ratio* yang menunjukkan sekian persen pendapatan negara yang berasal penerimaan pajak. Pada umumnya besarnya *tax ratio* antara satu negara dengan negara yang lainnya berbeda. Zandjani (1992: 32) menyatakan bahwa ada beberapa faktor penting yang menyebabkan kondisi tersebut yaitu, perbedaan pendapatan per kapita, perbedaan tingkat keterbukaan sistem ekonomi, perbedaan tingkat moneterisasi, perbedaan dalam kapasitas administrasi, perangkat peraturan perpajakan dan peraturan pelaksanaan, serta masyarakat khususnya wajib pajak dan keadaan lingkungannya.

Negara menggunakan PDB sebagai salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah pendapatan suatu negara. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat ekonomi yang dicapai tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sehingga tingkat

kenaikan PDB yang dapat menyebabkan perubahan rasio pendapatan negara karena PDB merupakan pembilang dari perhitungan *Tax Ratio*.

Tabel 1.2
Perkembangan PDB Negara ASEAN-5
Tahun 2012-2016
(dollar)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	917.869.910.106	912.524.136.718	890.814.755.233	860.854.235.065	932.256.495.234
Filipina	250.092.092.998	271.836.123.725	284.584.522.899	292.774.099.014	304.889.079.565
Malaysia	314.443.149.443	323.277.158.907	338.061.963.396	296.434.003.329	296.535.930.381
Singapura	290.673.681.684	304.454.327.499	311.539.499.645	304.097.759.674	309.763.879.841
Thailand	397.558.094.270	420.333.333.333	407.339.361.696	401.399.422.443	411.755.164.833

Sumber: *World Bank*, 2018

Perkembangan PDB negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) dapat dilihat pada tabel 1.2. Besarnya PDB dari tahun 2012 sampai 2016 pada negara tersebut cenderung berfluktuatif. Selain itu, PDB pada negara Indonesia merupakan PDB yang paling tinggi jika dibandingkan dengan empat negara ASEAN lainnya. Menurut Chenery (1975), sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan pembangunan negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan sangatlah penting. Sebab, pajak juga diartikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki

peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi (Rachdianti *et .al*, 2016).

Tabel 1.3
Perkembangan *Tax Revenue* Negara ASEAN-5
Tahun 2012-2016
(dollar)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	68.606.786.635	75.379.317.167	80.135.378.961	86.726.537.636	89.693.481.035
Filipina	25.652.177.398	28.942.745.721	32.396.016.231	34.215.423.582	37.323.500.851
Malaysia	37.249.649.298	38.308.162.970	40.335.357.158	40.638.995.730	41.597.509.189
Singapura	36.762.450.438	37.493.273.110	39.700.201.961	40.842.387.656	43.061.701.855
Thailand	57.286.445.687	65.565.264.541	62.053.615.276	66.152.012.668	67.675.516.043

Sumber: *World Bank*, 2018

Pada tabel 1.3 ini menjelaskan perkembangan besarnya *tax revenue* negara ASEAN-5 dari tahun 2012 sampai 2016. Mayoritas negara ASEAN-5 mengalami peningkatan pada *tax revenue* untuk setiap tahunnya. Hanya saja pada negara Thailand terjadi penurunan penerimaan pajak di tahun 2014 sebesar US\$ 3.511.649.265. Besar-kecilnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri (Syahputra, 2006).

Untuk tumbuh menjadi kawasan ekonomi dunia, maka negara-negara di kawasan ASEAN terutama ASEAN-5 saat ini merespon tren penurunan tarif PPh (Penghasilan) badan secara global. Hal ini dilakukan agar kawasan ASEAN-5

menciptakan keunggulan kompetitif bagi investor asing. Sehingga dengan adanya kecenderungan penurunan tarif pajak badan pada negara ASEAN-5 hal ini diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak PPh dari perusahaan-perusahaan terutama perusahaan asing.

Tabel 1.4
Tarif PPh Badan Negara ASEAN-5
Tahun 2012-2016
(persen)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	25	25	25	25	25
Fillipina	30	30	30	30	30
Malaysia	25	25	25	24	24
Singapura	17	17	17	17	17
Thailand	23	20	20	20	20

Sumber: *Trading Economics, 2018*

Berdasarkan tabel 1.4 negara Indonesia, Filipina, dan Singapura cenderung tidak melakukan penurunan tarif PPh badan pada tahun 2012-2016. Hal ini dilakukan untuk menjaga penerimaan pajak negara agar tetap stabil. Sedangkan untuk negara Malaysia melakukan penurunan tarif PPh badan di tahun 2015 sebesar 24 persen. Penurunan tarif PPh badan juga terjadi di negara Thailand sejak tahun 2013 menjadi 20 persen. Fenomena terjadinya penurunan tarif PPh badan saat ini dilakukan untuk menarik bisnis serta investor asing, sehingga akan lebih banyak modal perusahaan yang diinvestasikan pada negara yang memiliki tarif pajak rendah.

Besarnya penerimaan pajak pada negara ASEAN-5 ini tidak lepas dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam pembentukan PDB. Terutama pada sektor manufaktur sebagai salah satu sektor dominan dan memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB negara sehingga berpengaruh positif pada kinerja penerimaan pajak. Gambaran kondisi sektor manufaktur negara ASEAN-5 dapat dilihat pada tabel 1.5:

Tabel 1.5
Kontribusi Sektor Manufaktur Terhadap PDB ASEAN-5
Tahun 2012-2016
(persen)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	21.45	21.03	21.08	20.99	20.51
Filipina	20.56	20.41	20.61	20.04	19.65
Malaysia	23.14	22.84	22.87	22.75	22.27
Singapura	18.63	17.26	17.76	17.98	17.68
Thailand	28.11	27.73	27.72	27.50	27.39

Sumber: *World Bank*, 2018

Dari tabel 1.5 terlihat jelas bahwa dari tahun 2012 sampai 2016 negara Thailand memiliki kontribusi sektor maufaktur terhadap PDB tertinggi dibandingkan keempat negara lainnya. Kontribusi sektor manufaktur negara Thailand terhadap PDB di tahun 2012 sebesar 28,11 persen, sedangkan di tahun 2016 sebesar 27,39 persen. Negara Singapur memiliki kontribusi paling rendah di tahun 2013 sebesar 17,26 persen.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat digunakan sebagai strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hal tersebut

dapat tercapai melalui agroindustri sebagai subsistem agribisnis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.6
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDB ASEAN-5
Tahun 2012-2016
(persen)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	13.37	13.36	13.34	13.49	13.47
Filipina	11.83	11.25	11.33	10.26	9.66
Malaysia	9.79	9.11	8.87	8.46	8.66
Singapura	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Thailand	11.51	11.32	10.09	8.99	8.50

Sumber: *World Bank*, 2018

Menurut tabel 1.6 negara Indonesia memiliki kontribusi sektor pertanian terhadap PDB terbesar. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara agraris memiliki luas lahan pertanian serta potensi dari sektor pertanian yang tinggi. Di tahun 2012 negara Indonesia memiliki kontribusi sektor pertanian sebesar 13,37 persen kemudian meningkat menjadi 13,47 persen di tahun 2016. Sedangkan negara Singapura sebagai negara maju dengan lahan pertanian yang sangat sempit hanya memiliki kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 0,03 dari tahun 2012 sampai 2016.

Sektor jasa sebagai sektor ekonomi tersier saat ini semakin memegang peranan besar dan penting di banyak negara, salah satunya negara Singapura. Peran penting sektor jasa dalam perekonomian bukan hanya bersumber dari kontribusinya terhadap PDB, tetapi juga dari perannya sebagai input antara seluruh aktivitas

perekonomian negara. Besarnya kontribusi dari seluruh kegiatan produksi jasa yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah dapat terlihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7
Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDB ASEAN-5
Tahun 2012-2016
(persen)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	40.87	41.52	42.24	43.31	43.66
Filipina	56.92	57.63	57.34	58.84	59.60
Malaysia	49.02	49.94	50.12	51.17	51.66
Singapura	69.50	70.99	70.43	69.92	70.05
Thailand	51.06	51.70	53.07	54.79	55.72

Sumber: *World Bank*, 2018

Berdasarkan tabel 1.7 negara Singapura sebagai satu-satunya negara maju pada ASEAN-5 memiliki besarnya kontribusi sektor jasa terhadap PDB tertinggi yaitu 69,50 persen di tahun 2012 dan 70,05 persen di tahun 2016. Sedangkan sektor jasa di negara Indonesia hanya memiliki kontribusi sebesar 40,87 persen di tahun 2012 dan meningkat menjadi 43,66 persen di tahun 2016.

Tabel 1.8
Kontribusi Sektor Impor Terhadap PDB ASEAN-5
Tahun 2012-2016
(persen)

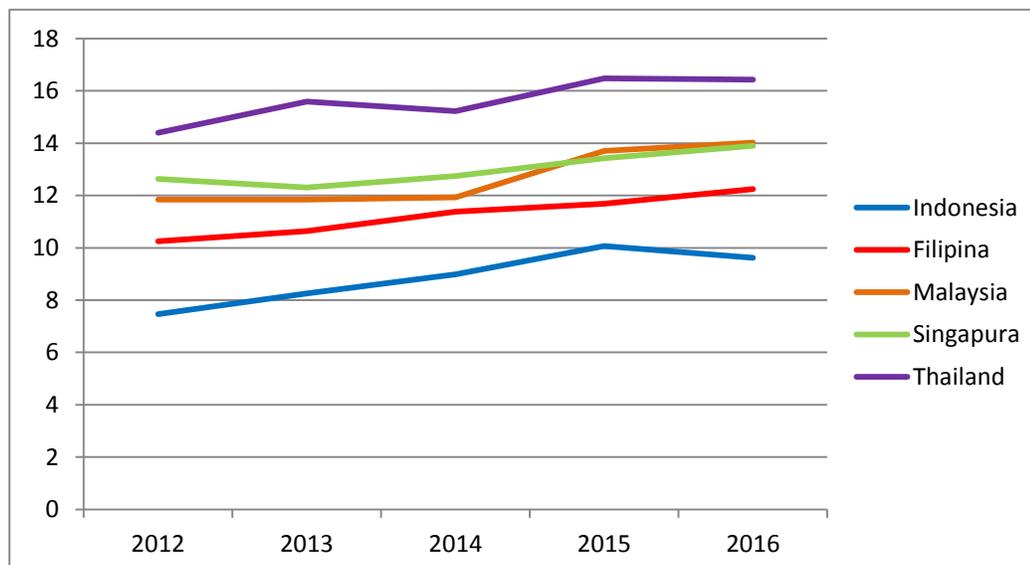
Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	24.99	24.71	24.41	20.78	18.32
Filipina	34.08	32.23	32.56	34.29	36.94
Malaysia	68.54	67.09	64.52	62.95	60.98
Singapura	173.63	171.61	167.98	151.66	142.06
Thailand	68.72	65.29	62.51	57.19	53.55

Sumber: *World Bank*, 2018

Dalam perdagangan Internasional, impor merupakan salah satu aktivitas yang mudah untuk dikenakan pajak dibandingkan dengan aktivitas domestik lainnya. Berdasarkan tabel 1.8 terlihat bahwa negara Singapura memiliki kontribusi dari sektor impor tertinggi sepanjang tahun 2012 sampai 2016. Besarnya angka kontribusi sektor impor tertinggi di Singapura adalah 173,63 persen pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan masih banyaknya bahan baku yang dibutuhkan oleh sektor manufaktur industri dan sektor jasa melalui impor.

Untuk melihat kinerja pada sektor perpajakan, seringkali pemerintah menggunakan *tax ratio* sebagai salah satu ukurannya. Sehingga dapat terlihat seberapa besar tingkat pemungutan pajak di suatu negara, yang dihitung dengan membandingkan besarnya penerimaan pajak dengan besarnya PDB. Semakin besar angka *tax ratio*, maka semakin besar pula kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak.

Gambar 1.4
Perkembangan *Tax Ratio* Negara ASEAN-5
Tahun 2012-2016
(persen)



Sumber: *World Bank*, 2018 (data diolah)

Gambar 1.4 ini menjelaskan perkembangan besarnya *tax ratio* negara ASEAN-5 dari tahun 2012 sampai 2016. *Tax ratio* pada lima negara tersebut cenderung mengalami fluktuatif. Nilai *tax ratio* paling tinggi berada pada negara Thailand, dengan nilai *tax ratio* di tahun 2012 sampai 2016 secara berurutan adalah 14,4 persen, 15,59 persen, 15,23 persen, 16,48 persen, dan 16,43 persen. Sedangkan untuk nilai *tax ratio* paling rendah berada pada negara Indonesia, secara berurutan dari tahun 2012 sampai 2016 besarnya *tax ratio* adalah 7,47 persen, 8,26 persen, 8,99 persen, 10,07 persen, dan 9,62 persen. Besarnya *tax ratio* yang ideal berkisar 20 persen, sedangkan jika dilihat pada gambar 1.4 besarnya *tax ratio* pada negara ASEAN-5 masih di bawah angka ideal *tax ratio*. Konsekuensinya adalah jika penerimaan pajak pada negara masih rendah maka hutang negara pun akan bertambah.

Penggunaan *tax ratio* sebagai ukuran kinerja perpajakan memunculkan kritik, Iman Sugema (2004) telah mempertanyakan ukuran keberhasilan *tax ratio* bila hanya berdasarkan angka penerimaan pajak. Pasalnya, hal itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan *tax ratio* yang relative konstan dari PDB. Setiyaji (2007) juga menjelaskan bahwa penggunaan *tax ratio* dianggap tidak mencukupi jika digunakan untuk mengukur kinerja pemungutan pajak. Selanjutnya, Setiyaji dan Amir (2005) menyatakan tidak validnya *tax ratio* sebagai ukuran kinerja penerimaan pajak kemudian memunculkan usulan untuk melihat kinerja penerimaan pajak melalui beberapa indikator lain, antara lain *tax coverage ratio* dan *tax buoyancy ratio*. Dari sudut pandang *tax coverage ratio*, ternyata kinerja penerimaan pajak negara pun juga

tidak terlalu bagus. Kemudian muncul ukuran *tax buoyancy* yang dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja penerimaan pajak. *Tax buoyancy* merupakan perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Dengan kata lain, *buoyancy* adalah elastisitas penerimaan perpajakan terhadap PDB yang menunjukkan berapa persen perubahan penerimaan pajak apabila PDB berubah satu persen. Wijayanti (2010) menyatakan bahwa nilai *buoyancy* pajak yang lebih kecil dari satu mengindikasikan elastisitas pajak yang rendah dan tidak efektifnya perubahan diskresioner, sedangkan nilai *buoyancy* pajak yang lebih besar dari satu mengindikasikan perubahan diskresioner meningkatkan penerimaan pajak.

Berbeda dengan Jenkins *et al.*(2000) *tax buoyancy* mengukur respon dari total penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional. Total responsivitas tersebut memperhitungkan peningkatan pendapatan dan perubahan diskresioner yaitu, tarif pajak dan basis pajak yang dibuat oleh otoritas pajak dalam sebuah sistem pajak.

Tabel 1.9
Perkembangan *Tax buoyancy* Negara ASEAN-5
Tahun 2012-2016
(dalam persen)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	1,20	0,92	0,61	0,92	0,46
Filipina	1,45	1,34	1,23	1,03	1,04
Malaysia	1,80	0,59	0,63	0,17	0,39
Singapura	1,81	0,42	1,59	0,50	2,23
Thailand	0,36	2,92	-2,38	1,65	0,41
Rata-rata <i>tax buoyancy</i>	1,32	1,24	0,34	0,85	0,91

Sumber : *World Bank*, 2018 (data diolah).

Perkembangan nilai *tax buoyancy* dari tahun 2012-2016 untuk negara ASEAN-5 dijelaskan pada tabel 1.9 di atas. Nilai *tax buoyancy* untuk lima negara cenderung mengalami fluktuatif. Di tahun 2012 nilai *tax buoyancy* Indonesia dan Thailand berada di bawah nilai rata-rata *tax buoyancy* ASEAN-5. Kemudian di tahun 2013, negara dengan nilai *tax buoyancy* yang berada di bawah nilai rata-rata *tax buoyancy* ASEAN-5 bertambah menjadi tiga negara yaitu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, sedangkan sisanya berada di atas nilai rata-rata *tax buoyancy*. Di tahun 2014 hanya ada satu negara yaitu Thailand dengan nilai *tax buoyancy* yang negatif dan di bawah nilai rata-rata *tax buoyancy* ASEAN-5. Hal ini dikarenakan Thailand mengalami penurunan *tax revenue* dan PDB di tahun 2014. Selanjutnya, untuk negara dengan nilai *tax buoyancy* yang berada di atas rata-rata *tax buoyancy* ASEAN-5 pada tahun 2015 adalah negara Indonesia, Filipina, dan Thailand, sedangkan di tahun 2016 hanya negara Filipina dan Singapura.

Besarnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal adalah tarif pajak itu sendiri (Syahputra, 2006).

Selain faktor-faktor tersebut, korupsi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penerimaan pajak suatu negara. Seperti yang dijelaskan oleh Christianto (2014) bahwa dengan adanya kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak atau kasus korupsi pajak ini mampu menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak dalam

membayar pajak. Sehingga akan berpengaruh negative terhadap kinerja penerimaan pajak negara.

Gambar 1.5
***Control of Corruption* Negara ASEAN-5**
Tahun 2012-2016
(persen)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	-0.64	-0.61	-0.56	-0.46	-0.40
Filipina	-0.56	-0.38	-0.44	-0.45	-0.49
Malaysia	0.24	0.35	0.41	0.24	0.10
Singapura	2.12	2.08	2.07	2.09	2.09
Thailand	-0.37	-0.34	-0.45	-0.49	-0.39

Sumber : *World Bank*, 2018

Control of Corruption menjelaskan persepsi responden tentang sejauh mana kekuasaan publik dilakukan untuk keuntungan pribadi, termasuk bentuk korupsi kecil dan besar, serta “penangkapan” negara oleh elit dan kepentingan pribadi. Menurut gambar 1.5 dari tahun 2002 sampai 2016 terlihat bahwa hanya negara Singapura yang memiliki tingkat pengendalian korupsi di atas angka 0 yang artinya kasus korupsi sudah dapat dikendalikan dengan baik di negara Singapura. Sedangkan untuk negara Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand masih cenderung memiliki tingkat pengendalian korupsi yang rendah.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sehingga untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, maka dalam perencanaan model pajak perlu melibatkan berbagai faktor yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah banyak studi mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak suatu negara. Salah satunya adalah faktor tradisional. Faktor tradisional dapat berupa unsur dasar dalam pengenaan pajak (*tax base*) atau disebut sebagai *tax handles*. Analisis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan dasar pengenaan pajak tersebut seperti, pendapatan per kapita sebagai dasar pajak penghasilan, rasio sektor pertambangan terhadap PDB sebagai dasar pajak penghasilan migas, serta jumlah ekspor dan impor terhadap PDB sebagai dasar pajak luar negeri, dan rasio sektor pertanian terhadap PDB. Sehingga variabel dasar pengenaan pajak terhadap penerimaan pajak pada umumnya menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini dikarenakan jika dasar pengenaan pajak mengalami peningkatan maka jumlah pajak yang dibayarkan akan meningkat, dan penerimaan pajak pemerintah juga akan meningkat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel *share* sektor manufaktur, *share* sektor pertanian, *share* sektor impor, *share* sektor jasa, defisit anggaran, dan korupsi terhadap besarnya *tax buoyancy* di negara ASEAN-5. Penelitian mengenai pengaruh variabel dasar pengenaan pajak terhadap penerimaan pajak juga dilakukan di berbagai negara. Penjelasan mengenai penggunaan variabel dalam penelitian tersebut dijelaskan oleh penelitian Ahmed (2010) yang dilakukan pada negara berkembang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel *tax handles*, berupa pertumbuhan sektor impor, sektor manufaktur, sektor jasa, sektor moneter, dan defisit anggaran, berpengaruh positif terhadap elastisitas penerimaan pajak (*tax buoyancy*). Sedangkan untuk variabel *tax handles* lainnya, berupa pertumbuhan hibah

berpengaruh negatif terhadap *tax buoyancy*, serta pertumbuhan di sektor pertanian menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap *tax buoyancy*.

Selanjutnya, variabel korupsi juga digunakan dalam penelitian ini yang dijelaskan oleh Gupta (2007) bahwa variabel korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja penerimaan negara. Sebab, semakin tinggi tingkat korupsi pada suatu negara hal ini akan menyebabkan menurunnya penerimaan negara terutama sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. Penurunan tersebut diakibatkan karena semakin rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam ekonomi makro. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui intervensi dalam pengeluaran pemerintah, serta peningkatan penerimaan pajak negara melalui berbagai reformasi tata kelola pajak.

Rendahnya kinerja penerimaan pajak pada negara ASEAN-5 ini menjadi salah satu permasalahan dalam alokasi pembiayaan pembangunan negara. Hal ini dapat terlihat dari besarnya *tax ratio* dan *tax buoyancy* pada masing-masing negara. Bahwa realitanya perkembangan *tax ratio* pada negara ASEAN-5 masih sangat berfluktuatif. Dibandingkan dengan keempat negara lainnya yaitu, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand, ternyata nilai *tax ratio* Indonesia termasuk yang paling rendah. Hal ini terlihat dari perkembangan nilai *tax ratio* Indonesia dari tahun 2012

hingga 2016 masih berada di bawah angka 10 persen dari PDB. Padahal, Indonesia memiliki angka *tax revenue* dan PDB terbesar jika dibandingkan dengan keempat negara lainnya. Sedangkan untuk sisanya, nilai *tax ratio* berada lebih dari 10 persen dari PDB meskipun demikian, nilai *tax ratio* Filipina masih berada di bawah rata-rata *tax ratio* negara ASEAN-5.

Selanjutnya, jika dilihat dari nilai *tax buoyancy* pada masing-masing negara ASEAN-5 hal ini hampir sama dengan perkembangan nilai *tax ratio*. Perkembangan nilai *tax buoyancy* dari tahun 2012 sampai 2016 cenderung mengalami fluktuatif. Indonesia mengalami penurunan nilai *tax buoyancy* pada tahun 2013 sebesar 0,28 persen dan tahun 2014 sebesar 0,31 persen dan hal ini menyebabkan penurunan pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun yang sama. Setelah terjadi penurunan nilai *tax buoyancy*, Indonesia kembali meningkatkan nilai *tax buoyancy* di tahun 2015 sebesar 0,31 persen namun hal ini ternyata menyebabkan penurunan pada pertumbuhan PDB di tahun 2015.

Penurunan pertumbuhan PDB juga dirasakan oleh beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Penurunan pertumbuhan PDB Thailand terjadi pada tahun 2014, hal ini sejalan dengan penurunan nilai *tax buoyancy* yang bernilai -2,38 persen. Sedangkan untuk Malaysia dan Singapura mengalami penurunan pertumbuhan PDB di tahun 2015 dan di ikuti juga dengan penurunan nilai *tax buoyancy* secara berurutan sebesar 0,46 persen dan 1,09 persen. Oleh karena itu, untuk melihat seberapa besar kinerja penerimaan pajak pada pertumbuhan ekonomi

suatu negara, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor penentu besarnya *tax buoyancy* di negara ASEAN-5 yaitu, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *share* sektor manufaktur terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5?
2. Bagaimana pengaruh *share* sektor pertanian terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5?
3. Bagaimana pengaruh *share* sektor impor terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5?
4. Bagaimana pengaruh *share* sektor jasa terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5?
5. Bagaimana pengaruh defisit anggaran terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5?
6. Bagaimana pengaruh korupsi terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5?
7. Bagaimana pengaruh reformasi perpajakan terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai diantaranya :

1. Untuk menganalisis pengaruh *share* sektor manufaktur terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5.
2. Untuk menganalisis pengaruh *share* sektor pertanian terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5.
3. Untuk menganalisis pengaruh *share* sektor impor terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5.
4. Untuk menganalisis pengaruh *share* sektor jasa terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5.
5. Untuk menganalisis pengaruh defisit anggaran terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5.
6. Untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5.
7. Untuk menganalisis pengaruh reformasi perpajakan terhadap *tax buoyancy* di negara ASEAN-5.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran potensi penerimaan pajak di negara anggota ASEAN-5.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan faktor-faktor penentu *tax buoyancy* di negara ASEAN-5 dengan menggunakan *share* per sektor terhadap PDB, defisit anggaran, dan korupsi.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, sehingga dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti di bidang yang sama di masa yang akan datang. Sekaligus bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait peningkatan kinerja pemungutan pajak di negara ASEAN-5.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bagian. Penulis menyusun sistematika penulisan laporan hasil penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah terkait kondisi pertumbuhan penerimaan pajak, PDB, reformasi perpajakan, dan *tax buoyancy* di negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand). Bab ini

juga menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian meliputi PDB, pengertian dan macam-macam pajak, defisit anggaran, teori korupsi, teori kinerja pajak, dan reformasi perpajakan. Pada bab ini juga dibahas terkait hubungan antar variabel dependen dan independen, hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian meliputi definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang mendukung penelitian. Menjelaskan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, uji asumsi klasik, serta uji statistik yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tentang analisis *tax buoyancy* pada negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) tahun 2002-2016.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis tentang kondisi *tax buoyancy*, *share* sektor terhadap PDB, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi perpajakan pada negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand). Serta pembahasan mengenai hasil analisis tentang *tax buoyancy* pada negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand) tahun 2002-2016.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan mencakup saran yang dapat direkomendasikan sesuai hasil penelitian kepada pihak yang berkaitan dengan masalah tentang analisis *tax buoyancy* pada negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, SIngapura, dan Thailand) tahun 2002-2016.